

Urgensi Pendidikan Multikultural, Pendidikan Segregasi dan Pendidikan Inklusi di Indonesia

Irawati¹, Mohd Winario²

^{1,2}Mahasiswa Doktoral Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 27-12-2020

Disetujui: 31-12-2020

Diterbitkan: 31-12-2020

Kata kunci:

Urgensi

Pendidikan Multikultural

Segregasi

Inklusi

ABSTRAK

Abstract: Multicultural education respects plurality and heterogeneity as a consequence of cultural, ethnic, ethnic and religious diversity, segregation education for children with special needs has yet to show a bright spot in providing services for them, inclusive education is the latest development of an educational model for children with disabilities. formally allows all children to learn together regardless of the difficulties or differences that may exist to them. So that between multicultural education, segregation education and inclusive education there is a correlation (relationship), the three of which are important issues related to education in Indonesia. So that the authors in this paper will discuss the importance of multicultural education, segregation education and inclusive education in Indonesia. In this paper the writer uses qualitative methods, by means of descriptive and argumentative analysis. The results of this study indicate that: first, multicultural education is a new symptom in the association of humans who yearn for equal rights, including the right to get the same education for all people. This multicultural education is intended to create a harmonious life in a pluralistic society. Second, segregation education is education that is carried out separately in terms of curriculum, administration and teaching staff, segregation education in practice is in the form of special schools and special primary schools and integrated schools. Third, with inclusive education, which provides opportunities for children with disabilities to learn together with normal children, there are still many obstacles, both regarding teachers who do not really understand about inclusive education and also the difficulty of changing the unfavorable image of society about children with disabilities. This will hamper the implementation of inclusive schools in public schools. Children with disabilities also have the same rights to attend school education as other children.

Abstrak: Pendidikan multikultural menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, suku dan aliran atau agama, pendidikan segregasi bagi anak berkebutuhan khusus sampai saat ini belum menunjukkan titik terang dalam memberikan layanan bagi mereka, pendidikan inklusi merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkelainan yang secara formal memungkinkan semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Sehingga antara pendidikan multikultural, pendidikan segregasi dan pendidikan inklusi terdapat korelasi (hubungan) yang ketiganya merupakan permasalahan penting yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Sehingga penulis dalam makalah ini akan membahas pentingnya pendidikan multikultural, pendidikan segregasi dan pendidikan inklusi di Indonesia. Pada penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan cara analisis deksriptif dan argumentatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Pendidikan multikultural merupakan gejala baru di dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang. pendidikan multikultural ini adalah dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba majemuk. Kedua, Pendidikan segregasi adalah pendidikan yang dilakukan secara terpisah baik dari segi kurikulum, penyelenggaraan dan tenaga pendidikny, pendidikan segregasi dalam praktiknya berbentuk sekolah luar biasa dan sekolah dasar luar biasa dan sekolah terpadu. Ketiga, dengan pendidikan inklusi, yang

memberikan kesempatan bagi anak berkelainan belajar bersama dengan anak normal juga masih banyak kendala baik menyangkut guru-gurunya yang belum memahami benar tentang pendidikan inklusi juga sulitnya merubah image masyarakat yang kurang baik tentang anak berkelainan. Hal ini akan menghambat pelaksanaan sekolah inklusi di sekolah umum. Anak-anak berkelainan juga memiliki hak yang sama untuk mengikuti pendidikan di sekolah sebagaimana anak yang lainnya.

Alamat Korespondensi:

Irawati

Mahasiswa Doktoral Pendidikan Agama Islam

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: irawati@uin-suska.ac.id

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak setiap anak untuk semua suku, agama dan semua golongan. Bukan hanya untuk suku tertentu, agama tertentu saja dan bukan hanya kepada mereka yang mendapatkan kesempurnaan dalam hidup, bukan hanya untuk mereka yang memiliki kekayaan saja melainkan hak untuk diterima oleh semua golongan. Seperti untuk mereka yang miskin harta, mereka yang kurang mampu bahkan pendidikan juga untuk mereka yang memiliki kekurangan dari segi apapun tidak terkecuali untuk mereka yang menyandang cacat. Berdaya manusia agar memperoleh kemampuan sosial dan perkembangan individu yang optimal memberikan relasi yang kuat antara individu dengan masyarakat dan lingkungan budaya sekitarnya (Idris, 1987). Lebih dari itu, pendidikan merupakan proses “memanusiakan manusia” dimana manusia diharapkan mampu memahami dirinya, orang lain, alam dan lingkungan budayanya (Driyarkara, 1980). Atas dasar inilah pendidikan tidak terlepas dari budaya yang melingkupinya sebagai konsekwensi dari tujuan pendidikan yaitu mengasah rasa, karsa dan karya. Pencapaian tujuan pendidikan tersebut menuai tantangan sepanjang masa karena salah satunya adalah perbedaan budaya. Olehnya, kebutuhan terhadap pendidikan yang mampu mengakomodasi dan memberikan pembelajaran untuk mampu menciptakan budaya baru dan bersikap toleran terhadap budaya lain sangatlah penting atau dengan kata lain pendidikan yang memiliki basis multikultural akan menjadi salah satu solusi dalam pengembangan sumberdaya manusia yang mempunyai karakter yang kuat dan toleran terhadap budaya lain.

Pertautan antara Pendidikan dan Multikultural merupakan solusi atas realitas budaya yang beragam sebagai sebuah proses pengembangan seluruh potensi yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekwensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran atau agama (Maslikhah, 2007). Pluralitas budaya, sebagaimana terdapat di Indonesia, menempatkan pendidikan Multikultural menjadi sangat urgen (Yaqin, 2005). Keberagaman budaya di Indonesia merupakan kenyataan historis dan sosial yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Keunikan budaya yang beragam tersebut memberikan implikasi pola pikir, tingkah laku dan karakter pribadi masing-masing sebagai sebuah tradisi yang hidup dalam masyarakat dan daerah. Tradisi yang terbentuk akan berlainan dari satu suku/daerah dengan suku/daerah yang lain. Pergumulan antar budaya memberikan peluang konflik manakala tidak saling memahami dan menghormati satu sama lain. Proses untuk meminimalisir konflik inilah memerlukan upaya pendidikan yang berwawasan Multikultural dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang majemuk dan heterogen agar saling memahami dan menghormati serta membentuk karakter yang terbuka terhadap perbedaan (Tilaar, 2004). Selanjutnya yang menjadi persoalan di masyarakat Indonesia juga adalah pendidikan anak yang berkebutuhan khusus atau yang disebut dengan pendidikan segregasi yang juga ada terkait dengan pendidikan inklusi.

Pendidikan segregasi bagi anak berkebutuhan khusus sampai saat ini belum menunjukkan titik terang dalam memberikan layanan bagi mereka. Pada kenyataannya terdapat banyak hal yang masih menyimpan permasalahan-permasalahan, diantaranya sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan pemerataan. Sebagian besar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus berada di kota-kota besar, sehingga tidak menjangkau mereka yang berada di daerah. Hal ini menyebabkan lebih dari 40% jumlah penyandang

cacat belum tertampung dalam pendidikan; 2) pendidikan segregasi mengandung nilai filosofis yang kurang menguntungkan karena dengan pendidikan yang terpisah semakin membatasi anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya yang normal. Akibatnya sekat perbedaan akan semakin jauh, sehingga akan mengalami kecanggungan dikemudian hari ketika harus kembali dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya; dan 3) biaya pendidikan semakin tinggi karena banyaksarana prasarana yang harus dipersiapkan dan harganya cukup mahal.

Dengan pendidikan model inklusi lebih menjangkau bagi seluruh anak berkebutuhan khusus yang tersebar di seluruh negeri ini untuk memperoleh kesempatan berpendidikan, karena mereka dapat ditampung di sekolah-sekolah reguler dimana mereka tinggal. Dengan demikian pemerataan pendidikan bagi anak kategori ini akan mudah tercapai. Selain dari itu pendidikan inklusi juga akan memberikan kesempatan yang besar bagi anak berkebutuhan khusus untuk berkembang potensinya tanpa dibedakan dengan teman sebayanya. Mereka dapat bersosialisasi, partisipasi, dan berekspresi dalam proses pembelajaran yang bermakna. Dengan memberikan kebebasan mereka untuk duduk bersama, belajar dan bermain bersama secara psikologis akan memperkecil jurang pemisah dengan teman lainnya, sehingga kepercayaan dirinya akan terbangun dengan baik. Kepercayaan diri bagi anak berkebutuhan khusus sangat menentukan dalam kehidupannya kelak. Mereka akan dapat hidup secara normal dan menyatu dengan masyarakat manakala dalam diri mereka terbentuk kompetensi sosial melalui belajar bersama di sekolah yang integrasi. Pendidikan inklusi merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkelainan yang secara formal mengikuti prinsip dasar sebagai berikut: "selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Sehingga antara pendidikan multikultural, pendidikan segregasi dan pendidikan inklusi terdapat korelasi (hubungan) yang ketiganya merupakan permasalahan penting yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, adanya hubungan antara pendidikan multikultural, pendidikan segregasi dan pendidikan inklusi, maka penulis dalam makalah ini akan membahas pentingnya pendidikan multikultural, pendidikan segregasi dan pendidikan inklusi di Indonesia.

LANDASAN TEORIS

Pendidikan Multikultural

Watson (2000) menyatakan dalam bukunya *Multiculturalism* bahwa, "...multiculturalism, as a principle to be acted upon, requires from us all a receptivity to difference, an openness to &anget a passion for equality, and ability to recognize our familiar in tlze strangeness of others." (multikulturalisme adalah suatu prinsip untuk bertindak, yang menghendaki kita semua untuk bersifat menerima perbedaan, terbuka terhadap perubahan, perhatian terhadap kesetaraan, dan mampu mengenali diri sendiri dalam kaitan dengan perbedaan pada diri orang lain). Dengan imbuhan "isme" menjadikan multikultural adalah paham atau ideologi yang ada dalam diri setiap orang. Dilihat dari pengertian di atas di dalamnya ada tiga unsur: 1) Kemampuan bertindak (pengetahuan, sikap dan perilaku); 2) Landasan untuk bertindak itu adalah "kehendak" atau "kesadaran" untuk menerima perbedaan, keterbukaan pikiran, dan orientasi anti diskriminasi; dan 3) kemampuan mengenali diri, artinya setiap pribadi harus memiliki jati diri atau integritas moral dalam hubungan dengan orang lain yang berbeda; di sini yang dimaksud adalah perpaduan antara kesadaran diri berkenaan dengan karakter, dan kemampuan menyadari keberadaan orang lain.

Sebagai sebuah prinsip multikulturalisme bukan sebuah dogma yang statis, tetapi adalah proses yang dinamis. Memaknai diri dan orang lain dalam konteks yang terus berubah adalah proses yang membuat setiap orang terus belajar dari pengalaman kebersamaan untuk terus memperbaiki diri dalam hal memperlakukan orang lain yang didasari oleh nilai-nilai keadilan sosial. Sebaliknya perubahan dalam pandangan dan cara-cara memperlakukan perbedaan bukan berarti, setiap pribadi kehilangan pemaknaan terhadap diri sendiri. Setiap individu justru harus mengenali dan memiliki identitas pribadi yang kuat dengan sistem nilai yang jelas, namun tidak untuk merendahkan orang lain.

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut para ahli sangat beragam, namun dalam konteks ini kebudayaan dilihat dalam perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks perspektif kebudayaan tersebut, maka multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya (Suparlan, 2002). Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan (Suparlan, 2002). Multikulturalisme memandang sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebut (Suparlan, 2002).

Istilah “multibudaya” (*multiculture*) jika ditelaah asal-usulnya mulai dikenal sejak tahun 1960-an, setelah adanya gerakan hak-hak sipil sebagai koreksi terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas terhadap melting pot yang sudah berjalan lama tentang kultur dominan Amerika khususnya di New York dan California (Banks, 1984). Will Kymlicka berpendapat, multibudaya merupakan suatu pengakuan, penghargaan dan keadilan terhadap etnik minoritas baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan kebudayaannya (Kymlicka, 1999). Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, hak asasi manusia, hak budaya komunitas, dan konsep-konsep lainnya yang relevan (Suparlan, 2002).

Tujuan dan Prinsip Pendidikan Multikultural

Tujuan pendidikan dengan berbasis multikultural dapat diidentifikasi menjadi (D.J. Skeel, 1995): 1) untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam; 2) untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan; 3) memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan keterampilan sosialnya; 4) untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok. Secara Konseptual; pendidikan multikultural menurut Gorsky mempunyai tujuan dan prinsip sebagai berikut: 1) setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka; 2) siswa belajar bagaimana belajar dan berpikir secara kritis; 3) mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan, dengan menghadirkan pengalaman-pengalaman mereka dalam konteks belajar; 4) mengakomodasikan semua gaya belajar siswa; 5) mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda; 6) mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang yang berbeda; 7) untuk menjadi warga negara yang baik di sekolah maupun di masyarakat; 8) belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda; 9) untuk mengembangkan identitas etnis, nasional dan global; dan 10) mengembangkan ketrampilan-ketrampilan mengambil keputusan dan analisis secara kritis sehingga siswa dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dalam pendidikan multikultural adalah sebagai berikut: 1) pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi-interpretasi yang berbeda; 2) isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok; 3) materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat; 4) pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman. dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas; dan 5) pendidikan hendaknya memuat model belajar mengajar yang interaktif agar supaya mudah dipahami (Maksum & Ruhendi, 2004). Dari uraian-uraian mengenai pendidikan multikultural tersebut dapatlah dipahami bahwa tujuan pendidikan multikultural ini adalah dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba majemuk.

Pendidikan Segregasi

Pendidikan segregasi adalah pendidikan yang dilakukan secara terpisah baik dari segi kurikulum, penyelenggaraan dan tenaga pendidiknya, pendidikan segregasi dalam praktiknya berbentuk sekolah luar biasa dan sekolah dasar luar biasa dan sekolah terpadu (Direktorat PLB, 2004). Sekolah Luar Biasa adalah sekolah yang khusus memberikan layanan pendidikan pada satu jenis kecacatan tertentu seperti SLB-A untuk anak tuna netra, SLB-B khusus anak tuna rungu dan sebagainya. sedang Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) adalah sekolah yang didirikan pemerintah dalam rangka penuntasan wajib belajar bagi anak usia 7-12 tahun berada di tiap kabupaten untuk menangani beberapa kecacatan. Jadi SDLB dapat menangani anak tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa dan tuna laras dalam satu satu sekolah. Sekolah terpadu adalah sekolah umum yang menerima anak berkelainan dengan kurikulum sama dengan anak normal seperti anak tuna netra bersekolah di SMU umum.

Pendidikan Inklusi

Menurut Sapon-Shevin (Oneil, 1995) menyatakan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dapat dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersamasama teman seusianya. Sedangkan Stainback (1990) mengemukakan sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Setiap murid mendapatkan bantuan dan dukungan yang diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah yang inklusi juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima menjadi bagian dari kelas tersebut dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya terpenuhi. Definisi sejenis dikemukakan Staub & Pack (1995) yang menyebutkan pendidikan inklusi adalah penempatan anak luar biasa tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas biasa.

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan yang melayani anak berkelainan di sekolah-sekolah reguler terdekat, bersama dengan teman seusianya pada kelas yang sama dengan program pendidikan yang layak, menantang sesuai kemampuan dan kebutuhan setiap murid. Melalui pendidikan inklusi, anak berkelainan dapat dididik bersama anak lainnya yang normal untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.

Landasan Pendidikan Inklusi

Landasan Filosofis

Landasan filosofis penerapan pendidikan inklusi di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas pondasi yang lebih mendasar lagi yang disebut Bhinneka Tunggal Ika (Abdurrahman, 2002). Filsafat ini sebagai wujud pengakuan kebinekaan manusia baik kebinekaan vertical maupun horizontal. Kebinekaan vertical ditandai dengan perbedaan kecerdasan, kekuatan, fisik, kemampuan finansial, kepangkatan, kemampuan, pengendalian diri dan sebagainya. Sedang kebinekaan horizontal diwarnai dengan perbedaan suku bangsa, ras, bahasa, dan sebagainya. Bertolak dari filosofis bhineka tunggal ika kelainan (kecacatan) dan keberbakatan hanyalah satu bentuk kebinekaan. Di dalam diri individu berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu, sehingga kecacatan dan keunggulan tidak memisahkan peserta didik satu dengan yang lainya, seperti halnya perbedaan suku, bahasa, agama, dan sebagainya. Hal ini selayaknya diwujudkan dalam system pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap silih asah, silih asih, dan silih asuh dengan semangat toleransi.

Landasan Yuridis

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkelainan atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusi atau berupa sekolah khusus. Sedang secara internasional, penerapan pendidikan inklusi mengikuti Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994) tentang kesempatan yang sama bagi individu berkelainan memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari system pendidikan yang ada.

Landasan Pedagogis

Pasal 3 UUSPN No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi WNI yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan ini mustahil dapat tercapai jika sejak semula mereka diisolasi dari teman sebayanya di sekolah-sekolah khusus

Landasan Empiris

Penelitian tentang pendidikan inklusi telah banyak dilakukan di Negara-negara Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregasi hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat. (Heller, et al, 1982). Hasil penelitian yang dilakukan Calberg & Cavale (1980) terhadap 50 buah penelitian, Wang & Baker (1986) terhadap 11 buah penelitian, Baker (1994) terhadap 13 buah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusi berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkelainan dan teman sebayanya.

METODE

Pada penulisan karya ilmiah ini penulis mengambil referensi terkait dengan tema tulisan ini, kemudian penulis analisa perkembangan yang terjadi di Indonesia. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan cara analisis deksriptif dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural sebagai bagian pendidikan di sekolah, memiliki dimensi yang luas. Di Indonesia, kebutuhan terhadap perlunya pendidikan multikultural sudah lama diwacanakan. Hanya saja dalam praktek di sekolah guru melihat pengembangan prinsip multikultural sebatas pengenalan adanya keragaman budaya dan keharusan untuk menghormati keragaman. Sejalan dengan itu, materi pembelajaran yang terkait dengan multikultural adalah penyajian keragaman adat istiadat, tarian, pakaian adat dari berbagai wilayah di Indonesia. Pada hakikatnya Pendidikan Multikultural yang dimaksud dalam tulisan ini, lebih dalam dari apa yang sedang dilakukan guru saat ini di sekolah. Bank (1999) memperkenalkan dimensi-dimensi dari pendidikan multikultural dalam lima ranah: 1) Integrasi isi (*content integration*); 2) proses mengkonstruksi pengetahuan (*the knowledge construction process*); 3) pengurangan prasangka (*prejudice reduction*); 4) pendidikan kesetaraan (*an equity pedagogy*); 5) memberdayakan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering scchool culture and sosial structure*). Kelima dimensi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 1. Dimensi Pendidikan Multikultural

Konsep pendidikan multikultural seperti yang digagas Bank di atas, relevan untuk diterapkan saat ini dalam konteks pendidikan di Indonesia. Sejalan dengan wacana penyederhanaan jumlah mata pelajaran yang ada di sekolah untuk kurikulum 2013, pengintegrasian isi pendidikan multikultural ke dalam mata pelajaran terkait merupakan cara yang paling tepat untuk diterapkan. Tanpa mengganggu isi dan tuntutan kurikulum mata pelajaran terkait, konsep kunci, prinsip dan generalisasi dari disiplin ilmu yang berkaitan dengan pendidikan multikultural dapat dikembangkan oleh guru. Selain itu proses peng-integrasi-an ini juga akan merangsang keterampilan berfikir kritis dan kemampuan partisipatif sebagai upaya pembentukan sikap-sikap multikultural. Mata pelajaran terkait yang dapat menjadi bagian pengintegrasian pendidikan multikultural diantaranya adalah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan. Kedua mata pelajaran ini dipelajari oleh siswa dalam semua jenjang pendidikan. Oleh karena itu, pada kedua mata pelajaran ini perlu keterampilan khusus dari guru-guru untuk mengintegrasikan konsep-konsep multikultural ke dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju, dikenal lima pendekatan, yaitu: 1) pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme; 2) pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan; 3) pendidikan bagi pluralisme kebudayaan; 4) pendidikan dwi-budaya; dan 5) pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia. Pendidikan multikultural merupakan gejala baru di dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang, "Education for All". Pendidikan multikultural (*multicultural education*) juga merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok.

Dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non Eropa. Sedangkan secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnik, ras, budaya, strata sosial dan agama (Tilaar, 2004). Selanjutnya, Banks (1994) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki lima dimensi yang saling berkaitan dan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan pelajar (siswa), yaitu:

Dimensi integrasi isi/materi (content integration).

Dimensi ini digunakan oleh guru untuk memberikan keterangan dengan "poin kunci" pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda. Secara khusus, para guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang beragam. Salah satu pendekatan umum adalah mengakui kontribusinya, yaitu guru-guru bekerja ke dalam kurikulum mereka dengan membatasi fakta tentang semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok. Di samping itu, rancangan pembelajaran dan unit pembelajarannya tidak dirubah. Dengan beberapa pendekatan, guru menambah beberapa unit atau topik secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural.

Dimensi konstruksi pengetahuan (knowledge construction).

Suatu dimensi dimana para guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri.

Dimensi pengurangan prasangka (prejudice reduction).

Guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh, ketika anak-anak masuk sekolah dengan perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda dan kelompok etnik lainnya, pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan perilaku intergroup yang lebih positif, penyediaan kondisi yang mapan dan pasti. Dua kondisi yang dimaksud adalah bahan pembelajaran yang memiliki

citra yang positif tentang perbedaan kelompok dan menggunakan bahan pembelajaran tersebut secara konsisten dan terus-menerus.

Penelitian menunjukkan bahwa para pelajar yang datang ke sekolah dengan banyak stereotipe, cenderung berperilaku negatif dan banyak melakukan kesalahpahaman terhadap kelompok etnik. dan ras dari luar kelompoknya. Penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan teks book multikultural atau bahan pengajaran lain dan strategi pembelajaran yang kooperatif dapat membantu para pelajar untuk mengembangkan perilaku dan persepsi terhadap ras yang lebih positif. Jenis strategi dan bahan dapat menghasilkan pilihan para pelajar untuk lebih bersahabat dengan ras luar, etnik dan kelompok budaya lain.

Dimensi pendidikan yang sama/adil (equitable pedagogy).

Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok. Strategi dan aktivitas belajar yang dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan secara adil, antara lain dengan bentuk kerjasama (cooperative learning), dan bukan dengan cara-cara yang kompetitif (competition learning). Dimensi ini juga menyangkut pendidikan yang dirancang untuk membentuk lingkungan sekolah, menjadi banyak jenis kelompok, termasuk kelompok etnik, wanita, dan para pelajar dengan kebutuhan khusus yang akan memberikan pengalaman pendidikan persamaan hak dan persamaan memperoleh kesempatan belajar.

Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (empowering school culture and social structure).

Dimensi ini penting dalam memperdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu, dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial (sekolah) yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beranekaragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat, misalnya berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, partisipasi ekstra kurikuler dan penghargaan staf dalam merespon berbagai perbedaan yang ada di sekolah.

Urgensi Pendidikan Segregasi

Menyebut pendidikan segregasi dalam prakteknya berbentuk pendidikan luar biasa atau pendidikan anak berkebutuhan khusus. Menurut UUSPN No. 20 Tahun 2003 pada Pasal 32 disebutkan bahwa pendidikan luar biasa merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (UUSPN No. 20 Tahun 2003 Bab IV Pasal 32). Notoatmodjo menyatakan pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang diberikan kepada anak-anak luar biasa yang meliputi anak tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras dan tuna ganda agar mereka dapat menikmati kehidupan yang layak sesuai dengan jenis dan taraf kelainannya. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki tingkat kelainan fisik (tuna rungu, tuna daksa), emosional (tuna laras), mental (tuna grahita), kecerdasan dan bakat istimewa agar mereka dapat menikmati kehidupan yang layak. Sedangkan anak didik luar biasa adalah anak yang menyandang kelainan fisik, intelektual, psikologis maupun kelainan sosial atau emosi atau tingkah laku (Supartinah, 1995). Terkait dengan pengertian anak luar biasa, maka yang menjadi ukuran dalam pendidikan bagi mereka adalah sejauh mana kesulitan yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran, sehingga anak tidak dapat diperlakukan sama dalam suatu pendidikan bersama dengan anak pada umumnya.

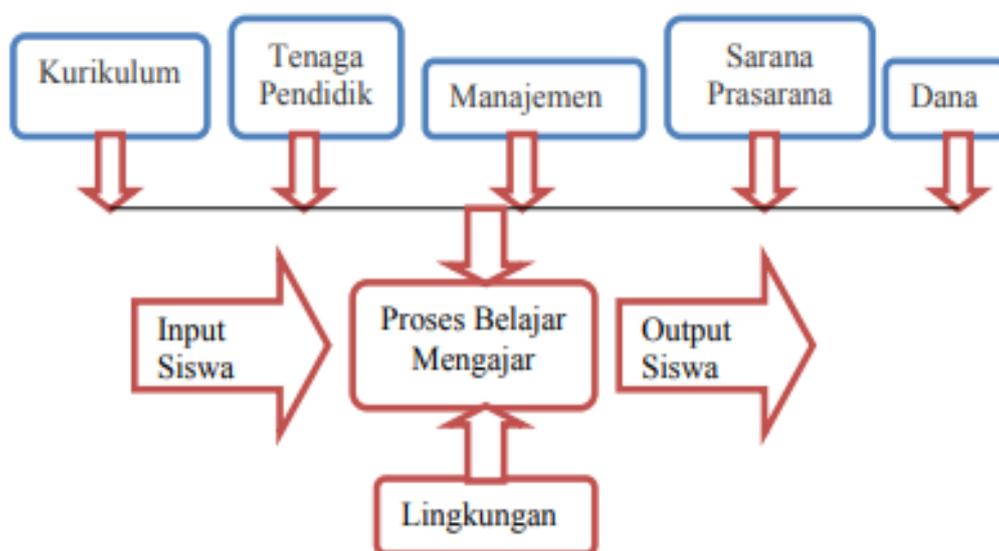
Melihat kondisi anak-anak yang berkebutuhan khusus di Indonesia, jika kita melihat kenyataannya sebenarnya sangat banyak jumlahnya, namun tidak terdata dengan pasti. Sehingga tugas pemerintah harus memperhatikan, memfasilitasi kebutuhannya, apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini berasal dari latar belakang masyarakat yang kurang mampu dari sisi ekonominya.

Urgensi Pendidikan Inklusi

Melihat kondisi dan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia, model pendidikan inklusi dapat dilakukan berbagai cara sebagai berikut: 1) inklusi penuh (kelas regular), yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lainnya (normal) sepanjang hari di kelas regular dengan kurikulum yang sama; 2) kelas regular dengan cluster, yaitu anak berkelainan belajar bersama anak normal di kelas regular dalam

kelompok khusus; 3) kelas regular dengan pull out, yaitu anak berkelainan belajar bersama anak normal di kelas regular dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas regular ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus; 4) kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, yaitu anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah regular, namun dalam bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas regular; dan 5) kelas khusus penuh, yaitu anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah regular. Setiap sekolah inklusi dapat memilih model-model mana yang akan diterapkan, terutama bergantung kepada: (1) jumlah anak berkelainan yang akan dilayani; (2) jenis kelainan masing-masing anak; (3) gradasi (tingkat) kelainan anak; (4) ketersediaan dan kesiapan tenaga kependidikan; (5) sarana dan prasarana yang tersedia.

Jika mutu lulusan pendidikan dipengaruhi oleh mutu atau kualitas proses pembelajaran, maka berbagai faktor yang menentukan dalam proses pembelajaran yang sebenarnya saling terkait seperti; input siswa, kurikulum, (bahan ajar), tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, manajemen dan lingkungan (sekolah, masyarakat dan keluarga), juga perlu diperhatikan. Komponen tersebut merupakan subsistem dalam system pendidikan (sistem pembelajaran), jika ada perubahan pada salah satu subsistem, maka menuntut perubahan atau penyesuaian komponen lainnya. Ini dapat dijelaskan dalam konstalasi sebagai berikut:



Gambar 2. Komponen Mutu Lulusan Pendidikan Multikultural

Dalam hal ini, bila dalam suatu pembelajaran di kelas terdapat perubahan pada input siswa dalam pendidikan inklusi, maka menuntut adanya penyesuaian (modifikasi) kurikulum (bahan ajar), peran serta guru, sarana prasarana, dana, manajemen (pengelolaan kelas), lingkungan, serta kegiatan belajar-mengajar. Salah satu karakteristik terpenting dari sekolah inklusi adalah satu komunitas yang kohesif, menerima dan responsif terhadap kebutuhan individu siswa. Sebagai ilustrasi dikemukakan spon-shevin ada lima pembelajarn di sekolah inklusi, yaitu (Sunardi, 2002):

Pendidikan inklusi berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan

Guru mempunyai tanggung jawab menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak secara penuh dengan menekankan suasana sosial kelas dan mengajarkan serta menjadi model perilaku yang menghargai perbedaan. Anak yang tahu bahwa ada temannya yang terpaksa menggunakan communication board karena tidak dapat berbicara akan menyadari bahwa anak-anak mempunyai kecepatan membaca yang berbeda-beda dan bahwa di kelas ini tidak semua merayakan Idul Fitri karena agamanya berbeda-beda.

Pendidikan inklusi berarti penerapan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas

Mengajar kelas yang heterogen memerlukan perubahan kurikulum secara mendasar, guru di sini secara konsisten akan bergeser dari pembelajaran yang kaku, berdasarkan buku teks, ke pembelajaran yang banyak melibatkan belajar kooperatif, tematik, berpikir kritis, pemecahan masalah dan asesmen secara autentik. Misalnya: guru kelas IV merencanakan pembelajaran dengan tema Jakarta. Dengan menggunakan peta DKI sebagai titik tolak materi pembelajaran dikembangkan untuk membaca, menulis, pemecahan masalah kreatif, ilmu pengetahuan sosial, dan sebagainya. Kegiatan belajar mengajar dapat berupa bermain peran, investigasi kelompok secara kooperatif dan sebagainya. Kegiatan yang direncanakan bersifat multimodalitas, interaktif, berpusat pada anak, partisipatif dan menyenangkan.

Pendidikan inklusi berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif

Perubahan kurikulum berkaitan dengan perubahan metode pembelajaran. Model tradisional, dimana seorang guru secara sendiri berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan semua anak di kelas harus diganti dengan model murid-murid bekerja sama, saling mengajar dan secara aktif berpartisipasi dalam pendidikannya sendiri dan pendidikan teman-temannya. Antara pembelajaran kooperatif dan kelas inklusi semua anak berada di satu kelas bukan untuk berkompetisi, tetapi untuk saling belajar dari yang lain.

Inklusi berarti penyediaan dorongan bagi guru dan kelasnya secara terus-menerus dan penghapusan hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi

Meskipun guru selalu dikelilingi oleh orang, pekerjaan dapat menjadi profesi yang terisolasi. Aspek terpenting dari inklusi meliputi pengajaran dengan tim kolaborasi dan konsultasi dan berbagai cara mengukur keterampilan, pengetahuan dan bantuan individu yang bertugas mendidik sekelompok anak. Kerjasama antara guru dengan profesi lain dalam suatu tim sangat diperlukan, seperti dengan para profesional, ahli bina wicara, petugas bimbingan, guru pembimbing khusus, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk dapat bekerja sama dengan orang lain secara baik memerlukan pelatihan dan dorongan secara terus-menerus.

Inklusi berarti melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan

Keberhasilan pendidikan inklusi sangat bergantung kepada masukan orang tua pada pendidikan anaknya. Misalnya keterlibatan mereka dalam penyusunan program-program pengajaran individual.

Dari profil pembelajaran dengan konsep inklusi menampung anak yang heterogen, ditangani oleh lembaga dari berbagai profesi, sebagai satu tim sehingga kebutuhan individual setiap anak dapat terpenuhi. Guru biasa perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam menangani kelas yang heterogen, perlu dikembangkan kerjasama tim dari berbagai tenaga profesional, dan sekolah perlu dilengkapi dengan fasilitas yang memungkinkan semua anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan multikultural merupakan gejala baru di dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang. Pendidikan multikultural ini adalah dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba majemuk. Pendidikan segregasi adalah pendidikan yang dilakukan secara terpisah baik dari segi kurikulum, penyelenggaraan dan tenaga pendidiknya, pendidikan segregasi dalam praktiknya berbentuk sekolah luar biasa dan sekolah dasar luar biasa dan sekolah terpadu. Terkait dengan pendidikan inklusi, yang memberikan kesempatan bagi anak berkelainan belajar bersama dengan anak normal juga masih banyak kendala baik menyangkut guru-gurunya yang belum memahami benar tentang pendidikan inklusi juga sulitnya merubah image masyarakat yang kurang baik tentang anak berkelainan. Hal ini akan menghambat pelaksanaan sekolah inklusi di sekolah umum. Anak-anak berkelainan juga memiliki hak yang sama untuk mengikuti pendidikan di sekolah sebagaimana anak yang lainnya.

REFERENCES

- Abdulrahman, M. (2003). Landasan Pendidikan Inklusif dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan LPTK. *Makalah dalam Pelatihan Buku Ajar bagi Dosen Jurusan PLB*, Yogyakarta.
- Ali, M., & Luluk, Y. R. (2004). *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post Modern. Mencari Visi Baru atas Realitas Baru Pendidikan Kita*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Banks, J. A. (1994). *Multiethnic Education: Theory and Practice* (3rd ed.). Needham, MA: Allyn and Bacon.
- Banks, J. A. (1975). *Teaching strategies for ethnic studies*. Newton: Allyn and Bacon.
- Carlberg, C., & Cavale, K. (1980). The Effect of Special Class Vs Regular Class Placement for Exceptional Children: a Meta Analysis. *The Journal of Special Education*.
- Driyarkara, N. (1980). *Karya lengkap Driyarkara: esai-esai filsafat pemikir yang terlibat penuh dalam perjuangan bangsanya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Heller, F., & Petersen, N. (1982). The Laschamp excursion. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences*, 306(1492), 169-177.
- Kymlicka, W. (1999). Comments on Shachar and Spinner-Halev: an update from the multiculturalism wars. *Multicultural questions*, 112, 112-13.
- Kymlicka, W. (1999). *Misunderstanding Nationalism* dalam *Theorizing Nationalism*, diedit oleh R. Beiner, Albany: State University of New York.
- Maksum, A., & Ruhendi, L. Y. (2004). *Paradigma pendidikan universal di era modern dan post-modern: mencari "visi baru" atas "realitas baru" pendidikan kita*. IRCiSoD.
- Maslikhah, Q. V. P. M., & Multikultural, P. (2007). *Rekonstruksi Sistem Pendidikan Berbasis Kebangsaan*. Surabaya: JP Books.
- ONEIL, J. (1995). Teachers And Technology-Potential and Pitfalls. *Educational Leadership*, 53(2), 10-11.
- Sapon-Shevin, M. (1995). Why Gifted Students Belong in Inclusive Schools. *Educational Leadership*, 52(4), 64.
- Skeel, D. J. (1995). *Elementary social studies: challenges for tomorrow's world*. Harcourt Brace College Pub.
- Stainback, W., & Stainback, S. (1990). *Support networks for inclusive schooling: Interdependent integrated education*. PH Brookes Pub. Co.
- Stoub, D., & Peck, C. A. (1995). *What are the Outcome for Non-Disable Student?* Educational Leadership.
- Sulthon, S. (2015). Mengenal Pendidikan Multikultural Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dengan Model Inklusi Dalam Pendidikan Islam. *Addin*, 7(1).
- Suparlan, P. (2002). Multikulturalisme. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 7(1), 9-18.
- Suparlan, P. (2014). *Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural*. Bali: Antropologi Indonesia.
- Supartinah, T. (1995). *Psikologi Anak Luar Biasa*. Surakarta: UNS Press.
- Tilaar, H. A. R., & Hapsari, S. D. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Watson, D. (2000). Basic problems in positive mood regulation. *Psychological Inquiry*, 11(3), 205-209.
- Yaqin, M. A. (2005). *Pendidikan multikultural: cross-cultural understanding untuk demokrasi dan keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Zahara, I. (1981). *Dasar-dasar kependidikan*. Padang: Angkasa Raya.